

Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah, Indonesia

Implementation of Poverty Alleviation Programs in Central Java, Indonesia

Mursid Zuhri dan Arif Sofianto

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Jl. Pemuda No. 127-133 Semarang, Jawa Tengah

Telp. (024) 3515591. Fax. (024) 3546802

E-mail: zmursid_2010@yahoo.co.id; 01arifsofianto@gmail.com

HP.08156507871 (Mursid Z); 085227001825 (Arif S)

Naskah diterima 18 Juni 2020, direvisi 24 Agustus 2020, disetujui 2 September 2020

Abstract

Central Java is one of the centers of national economic growth, but poverty still requires special attention. The research objective was to describe the implementation of poverty alleviation programs in Central Java, as well as to formulate poverty reduction designs that were implemented according to needs. This type of research was descriptive, using a mixed method approach, namely qualitative and quantitative. Research locations were in 15 districts in Central Java with the highest poverty rates, 777 informants involved, family heads from the poor, community/institutional leaders, village officials and program assistants. Data were collected using interview techniques, observation, and focused group discussion. The qualitative data analysis used an interactive model developed by Miles and Huberman. While the quantitative data analysis used descriptive statistics in the form of mean and percentage values. The conclusion of this study was First, in the implementation of poverty alleviation programs, there were many cases of wrong targeting due to inaccurate data, program implementation appeared to be more of a gift which increased consumptive behavior than productive, there was no education for people to release themselves from poverty. Second, the expected poverty reduction design was to use the principle of empowerment, the main role was in the poor, where they also determined the programs to be run on the principle of providing education to the poor to be productive and independent.

Keywords: poverty; prevention program; Central Java

Abstrak

Jawa Tengah menjadi salah satu kawasan pusat pertumbuhan ekonomi nasional, namun kemiskinan masih memerlukan perhatian khusus. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan implementasi program penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah, serta merumuskan desain penanggulangan kemiskinan yang implementatif sesuai dengan kebutuhan. Tipe penelitian ini ialah deskriptif, menggunakan pendekatan mixed method, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Lokasi penelitian di 15 kabupaten di Jawa Tengah dengan angka kemiskinan tertinggi, informan yang terlibat sebanyak 777 orang, para kepala keluarga dari unsur orang miskin, tokoh masyarakat/kelembagaan, aparat desa dan pendamping program. Data dikumpulkan dengan tehnik wawancara, observasi, serta *Focussed Group Discussion*. Analisis data kualitatif menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Sedang analisis data kuantitatif memakai statistik deskriptif berupa nilai rata-rata dan persentase. Kesimpulan penelitian ini ialah Pertama, dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan, terdapat banyak kasus salah sasaran akibat data yang kurang tepat, implementasi program nampak lebih bersifat pemberian yang meningkatkan perilaku konsumtif dibanding produktif, tidak ada pendidikan kepada masyarakat untuk melepaskan diri mereka dari kemiskinan. Kedua, desain penanggulangan kemiskinan yang diharapkan yakni adalah menggunakan prinsip pemberdayaan, peran utama berada pada masyarakat miskin dimana mereka ikut menentukan program yang akan dijalankan dengan prinsip pemberian edukasi kepada masyarakat miskin agar menjadi produktif dan mandiri.

Kata Kunci: kemiskinan; program penanggulangan; Jawa Tengah

Pendahuluan

Jawa Tengah memiliki angka kemiskinan yang tinggi, jauh lebih tinggi dibanding DKI Jakarta, Bali, Banten, dan Jawa Barat. Jumlah absolut penduduk miskin Jawa Tengah berada di posisi kedua setelah Jawa Timur. Berdasarkan data BPS tahun 2018, tercatat bahwa jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah sebanyak 3.897.200 jiwa, adapun Jawa Timur sebesar 4.332.590 jiwa (BPS, 2019).

Menurut BPS (Berita Resmi Statistik, Maret 2019) sumbangan terbesar pada angka kemiskinan antara lain bantuan pangan non tunai (BPNT) semakin lancar sehingga membantu pemenuhan kebutuhan. Berdasarkan karakteristik pekerjaan penduduk miskin di Jawa Tengah, sebesar 39,93 persen tidak bekerja, dan sebesar 60,07 persen bekerja, dimana 18,51 persen bekerja di sektor pertanian, dan 41,56 persen di luar sektor pertanian (BPS Jawa Tengah, 2019).

Kemiskinan dapat dipahami berdasarkan konsep yang komprehensif. Menurut Chambers (1998), kemiskinan adalah suatu *integrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1. Keterbatasan pemilikan aset (*proper*), 2. Ketidakberdayaan (*powerless*), 3. Kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), 4. Ketergantungan (*dependence*), dan 5. Keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis. Ragnar Nurkse (Kuncoro, 2004) mengemukakan teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*), yang mengatakan: "*a poor country is poor because it is poor*" (Negara miskin itu miskin karena dia miskin). Oleh karena itu, setiap usaha untuk mengurangi kemiskinan seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran dan perangkap kemiskinan ini (Mudrajad Kuncoro, 2004). Kemiskinan juga dapat dibagi dengan empat bentuk (Suryawati, 2005), yaitu Absolut, Relatif, Kultural, Struktural.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mengeluarkan berbagai program dan kegiatan untuk menggalang kemiskinan. Ada empat kelompok utama program penanggulangan kemiskinan. *Pertama*, kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. *Kedua*, kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. *Ketiga*, kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. *Keempat*, kelompok program lainnya untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan.

Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga adalah yang paling populer dan mendapatkan banyak perhatian. Program ini meliputi bantuan sosial dibidang kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kesehatan.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Sangat Miskin. Program ini dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers (CCT)*, berupa pemberian dana transfer yang dipergunakan untuk mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Menurut Nainggolan, dkk (2012) PKH telah berdampak positif dalam bidang kesehatan dan pendidikan, namun belum berdampak positif terhadap status sosial ekonomi. Hasil penelitian Mursyidah (2017) di Kabupaten Temanggung juga menunjukkan bahwa PKH belum berdampak pada perbaikan gizi bayi dan balita. Hasil penelitian Rohmi (2018) menunjukkan bahwa PKH efektif dari aspek input dan proses, dan output pendidikan, namun output untuk bidang kesehatan belum efektif.

Hasil penelitian Kharismawati & Rosdiana (2018) menunjukkan bahwa program PKH dan BPNT memiliki sumberdana dan SDM yang cukup,

namun ada hambatan teknis seperti mesin EDC yang tidak berfungsi, agen yang tidak ramah dalam pelayanan, kurangnya pengetahuan penerima program, serta adanya sikap pelaksana yang tidak bertanggung jawab.

Penelitian Mustafida (2019) menunjukkan BPNT memberikan dampak dan manfaat yang baik untuk kesejahteraan masyarakat, di sisi lain bagi sebagian KPM berdampak ketergantungan. Sesuai dengan hasil penelitian Marhaeni, dkk (2014), bahwa efektivitas program bantuan bidang pangan lebih rendah dibandingkan bantuan bidang pendidikan dan kesehatan.

Program perlindungan lainnya adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau yang dikenal dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS) berupa jaminan kesehatan, layanan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan. Pendanaan KIS bersumber dari 3 (tiga) anggaran pemerintah yaitu APBN (Kementerian Kesehatan), APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/ Kota.

Di sektor pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (usia 6 - 21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin. Bantuan ini berupa pemberian dana kepada anak sekolah dari keluarga miskin yang diberikan melalui rekening tabungan. Dana tersebut diperuntukkan memenuhi kebutuhan biaya pendidikan.

Program pemerintah pusat tersebut (BPNT, PKH, PIP, JKN) lebih mengarah pada bantuan sosial berbasis keluarga. Sesuai dengan hasil penelitian Nuraida, dkk (2019) di Kabupaten Subang bahwa program bantuan yang hanya berbasis keluarga dan tidak ada program khusus bagi kepala keluarga kurang efektif. Hal tersebut juga diperkuat hasil penelitian Apsari dkk (2019) di Kalimantan Selatan terkait

Program Gerbangmas-Taskin di Desa Pandak Daun (pemberdayaan ekonomi, masyarakat dan lingkungan/Tri Daya). Program pemberian bantuan modal (simpan pinjam) yang diberikan kepada anggota keluarga ini tidak efektif terhadap pertumbuhan ekonomi karena jumlah yang minim sehingga tidak mencukupi untuk modal dan akhirnya hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Program bantuan sosial biasanya diberikan dengan syarat yang ketat terutama administrasi kependudukan, dimana tidak semua orang yang benar-benar miskin memilikinya. Sebagian lagi justru terjadi salahsasaran akibat data yang kurang tepat. Sebagaimana hasil penelitian Suryawati (2014) di DKI Jakarta, dimana orang miskin tidak mendapatkan bantuan Kartu Jakarta Sehat (KJS) karena tidak memiliki KTP dan KK, meskipun sudah mengurus ke instansi terkait.

Di sisi lain, program penanggulangan kemiskinan juga memberi beberapa manfaat. Hasil penelitian Damanik & Marom (2016) menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan melalui program pelatihan keterampilan di Kelurahan Mangunharjo, Kota Semarang cukup efektif dimana warga miskin semakin meningkat perannya, dan mereka terentaskan dari kemiskinan. Peningkatan peran masyarakat miskin dalam penanggulangan kemiskinan sangat penting sebagai penentu keberhasilan program.

Hasil penelitian Asfi dan Wijaya (2015) tentang program Gerdu Kempling di Kota Semarang kurang efektif karena kapasitas masyarakat belum cukup mampu untuk mengambil peran yang besar dalam pembangunan. Dengan demikian, kegiatan atau bantuan yang diberikan kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bantuan terkesan sia-sia dan tidak

berdampak pada penyelesaian kemiskinan.

Program saat ini juga terkait dengan dengan ketepatan sasaran penerima program penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan laporan Susenas 2018, terdapat *inclusion error* maupun *exclusion error*. Rumah tangga tidak miskin yang menerima BPNT sebesar 46,69 persen padahal mereka seharusnya tidak berhak menerima. Di sisi lain penduduk miskin yang menerima BPNT sebesar 70,61 persen dan sisanya 29,39 persen tidak menerima BPNT padahal mereka berhak menerima. Begitu juga untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagian besar yang menerima adalah penduduk kategori desil 5 ke atas. Untuk Bantuan Siswa Miskin (BSM) sebagian besar adalah desil 6 ke bawah, meskipun masih ditemukan desil 10.

Provinsi Jawa Tengah menggulirkan berbagai program untuk penanggulangan kemiskinan seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat PBI, Beasiswa siswa miskin, Perbaikan rumah tidak layak huni, kartu tani dan nelayan, kredit tanpa agunan, Pendampingan desa miskin untuk setiap OPD satu desa. Namun program-program tersebut sifatnya masih dalam kerangka perlindungan sosial sedangkan program yang sifatnya meningkatkan pendapatan belum banyak dirasakan oleh orang-orang miskin.

Penelitian Ariyani, dkk (2015), tentang keberlanjutan program berdasarkan dimensi *input*, proses, dan *output* program berbasis zakat memiliki keberlanjutan lebih baik dibandingkan program CSR dan pemerintah. Hal tersebut terjadi karena adanya ketepatan pengelolaan dan sasaran, serta keberadaan kelembagaan di masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka perlu dilakukan penelitian atau kajian mengenai dampak program terhadap percepatan penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah. Apakah

program memberikan dampak kepada rumah tangga miskin, sudah sesuai dan memberikan perbaikan, atau konsep seperti apa yang sesuai kondisi lapangan. Berdasarkan pemikiran tersebut diatas, perlu dilakukan penelitian dalam rangka menemukan desain yang sesuai untuk menanggulangi masalah kemiskinan di Jawa Tengah di masa yang akan datang

Sesuai dengan latar belakang tersebut di atas, masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana implementasi program penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah?; 2) Bagaimana desain penanggulangan kemiskinan yang implementatif sesuai dengan kebutuhan di Jawa Tengah?

Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini deskriptif dengan pendekatan *mixed method*, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Lokasi penelitian di 15 Kabupaten di Jawa Tengah dengan angka kemiskinan tertinggi. Jumlah informan sebanyak 777 orang, dari unsur orang miskin 647 orang, sisanya tokoh masyarakat, aparat desa, dan pendamping program. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, pengisian kuesioner, serta FGD. Analisis data menggunakan teknik kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif menggunakan model interaktif dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Analisis kuantitatif jenis deskriptif berupa rerata, dan persentase yang diberlakukan terhadap data-data yang diambil dari kuesioner. Analisis kualitatif digunakan untuk menjelaskan sikap dan persepsi responden terhadap kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Hasil Dan Pembahasan

Profil Informan

Penelitian ini melibatkan sebanyak 647 informan dari masyarakat

penerima program penanggulangan kemiskinan yang tersebar di 15 Kabupaten.

Berdasarkan usia, sebagian besar merupakan penduduk usia produktif yaitu usia 31 – 50 tahun.

Tabel 1
Rentang usia Informan

| No | Rentang Usia | Jumlah | Persentase |
|----|-------------------|--------|------------|
| 1 | 20 tahun ke bawah | 2 | 0,31 |
| 2 | 21 – 30 tahun | 57 | 8,81 |
| 3 | 31 – 40 tahun | 245 | 37,87 |
| 4 | 41 – 50 tahun | 169 | 26,12 |
| 5 | 51 – 60 tahun | 64 | 9,89 |
| 6 | 61 tahun ke atas | 32 | 4,95 |
| 7 | NA | 78 | 12,06 |

Sumber : Data primer diolah (2019)

Berdasarkan data tabel 1 di atas, potensi kelompok produktif penduduk miskin sangat tinggi. Usia terbanyak adalah 31-40 tahun, kemudian usia 41-50 tahun, dan hanya sebagian kecil yang berusia di atas 60 tahun. Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi produktif pada sebagian besar penduduk miskin.

Jenjang pendidikan yang ditamatkan terbesar adalah jenjang sekolah dasar (SD) dan SMP.

Tabel 2
Tingkat Pendidikan Informan

| No | Pendidikan | Jumlah | Persentase |
|----|-------------------|--------|------------|
| 1 | Tidak Sekolah | 69 | 10,66 |
| 2 | SD sederajat | 365 | 56,41 |
| 3 | SMP sederajat | 144 | 22,26 |
| 4 | SMA sederajat | 51 | 7,88 |
| 5 | Diploma sederajat | 3 | 0,46 |
| 6 | NA | 15 | 2,32 |

Sumber : Data primer diolah (2019)

Dari tabel 2 di atas, tingkat pendidikan terbesar adalah SD, kemudian disusul SMP, dan tidak sekolah, hanya sebagian kecil yang lulus SMA. Kondisi tersebut mencerminkan besarnya peran tingkat pendidikan terhadap kemiskinan.

Berdasarkan status pekerjaan anggota rumah tangga informan hanya 40,48 persen yang bekerja tetap.

Tabel 3
Status Pekerjaan Informan

| No | Status Bekerja | Jumlah | Persentase |
|----|----------------|--------|------------|
| 1 | Belum bekerja | 410 | 30,62 |
| 2 | Bekerja | 542 | 40,48 |
| 3 | Tidak bekerja | 236 | 17,62 |
| 4 | Kadang2 | 151 | 11,28 |

Sumber : Data primer diolah (2019)

Berdasarkan data tabel 3 di atas, kurang dari separuh (40,48%) yang bekerja secara tetap, sebagian kecil bekerja di waktu tertentu saja (11,28%). Sebagian merupakan kelompok non produktif (belum bekerja dan tidak bekerja). Kondisi tersebut menunjukkan perlunya perluasan akses terhadap lapangan kerja.

Pekerjaan utama kepala keluarga informan didominasi oleh buruh tani (44,98%), buruh sektor jasa (10,36%), pedagang (8,50%), dan sektor lainnya (14,68%).

Berdasarkan pengeluaran rumah tangga per bulan, didapatkan bahwa mayoritas informan memiliki tingkat pengeluaran antara 1 – 2 juta rupiah per bulan. Data Berita Resmi Statistik Maret 2019 bahwa garis kemiskinan Jawa Tengah sebesar Rp. 369.385,- (BPS Jawa Tengah, 2019). Jika dikaitkan dengan klasifikasi status kesejahteraan masyarakat miskin berdasarkan konsep TNP2K, yaitu: 1) Sangat miskin dengan pengeluaran perkapita/bulan kurang dari 0.8 Garis Kemiskinan; 2) Miskin dengan kondisi pengeluaran sama dengan 0,8- dibawah Garis Kemiskinan; 3) Hampir miskin dengan kondisi pengeluaran sama dengan sampai kurang dari 1,2 Garis Kemiskinan; 4) Rentang Miskin dengan pengeluaran sama dengan 1,2 sampai kurang dari 1,6 Garis Kemiskinan; dan 5) Tidak Miskin dengan pengeluaran sama dengan atau di atas 1,6 Garis Kemiskinan. Dengan klasifikasi tersebut, serta penghitungan pengeluaran per kapita per bulan, maka didapati data pengeluaran keluarga miskin dibanding garis kemiskinan seperti pada tabel berikut.

Tabel 4
Status Pengeluaran Keluarga
Dibanding Garis Kemiskinan Jawa Tengah

| No | Pengeluaran per kapita | jumlah | % |
|----|------------------------|--------|-------|
| 1 | Sangat Miskin | 163 | 26,21 |
| 2 | Miskin | 87 | 13,99 |
| 3 | Hampir Miskin | 121 | 19,45 |
| 4 | Rentan Miskin | 136 | 21,86 |
| 5 | Tidak Miskin | 134 | 21,54 |
| 6 | NA | 6,00 | 0,96 |

Sumber : Data primer diolah (2019)

Data tabel 4 tersebut di atas menunjukkan sebagian orang (21,54%) memiliki pengeluaran jauh di atas rata-rata garis kemiskinan. Kondisi tersebut menunjukkan ada penerima program kemiskinan yang bukan orang miskin.

a. Program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

- **Kartu Jateng Sejahtera (KJS)**

Kartu Jateng Sejahtera merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka meringankan beban kelompok miskin tidak produktif. KJS diberikan kepada kelompok miskin tidak produktif yang belum tersentuh oleh bantuan pemerintah pusat. Program ini dijalankan oleh Dinas Sosial melalui sinergi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait.

- **Jamkesmas PBI Non Kuota**

Jamkesmas PBI non kuota bersumber dari pemerintah daerah sebagai untuk masyarakat miskin yang belum mendapatkan Program Indonesia Sehat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berinisiatif memberikan tambahan alokasi bantuan bagi keluarga miskin. Tercatat 327.000 jiwa menerima manfaat dari program ini. Program ini dijalankan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

- **Penanganan RTLH**

Program ini dilaksanakan dalam rangka memperbaiki kualitas tempat tinggal masyarakat miskin yang dijalankan oleh Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta menggandeng beberapa pihak terkait. Bentuk program berupa stimulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada rumah tangga miskin agar lebih layak huni.

- **Bantuan Siswa Miskin (BSM)**

BSM merupakan pendamping dari Program Indonesia Pintar dari pemerintah pusat. Program ini diberikan kepada siswa dari keluarga miskin yang belum menerima bantuan PIP atau KIP. Pada tahun 2014 siswa yang mendapatkan fasilitasi sebanyak 16.045, di tahun 2018 turun menjadi 7.479. dan pada tahun 2019 ditargetkan 10.000 siswa penerima BSM dengan anggaran sebesar 10 milyar rupiah.

- **SMK Boarding School**

SMK *Boarding School* diperuntukkan bagi keluarga miskin dengan harapan meningkatkan akses mereka terhadap lapangan kerja yang layak. Semua biaya ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Saat ini telah dibangun 3 SMK Negeri Jawa Tengah (boarding school) di Kabupaten Pati, Kabupaten Purbalingga, dan Kota Semarang. Kedepan akan dibangun asrama SMK Negeri (semi boarding school) di 15 kabupaten dengan kemiskinan tinggi.

- **Kartu Tani**

Kartu Tani merupakan program bantuan subsidi sarana produksi, terutama pupuk kepada petani. Harapan program ini adalah meringankan beban petani, sekaligus meningkatkan produktifitasnya. Program ini diberikan berupa insentif bagi petani dalam pembelian pupuk dengan harga yang berbeda. Sampai dengan bulan Desember 2018 telah disalurkan sebanyak 2.444.689 kartu kepada semua petani di Jawa Tengah.

- **Kartu Nelayan**

Kartu nelayan berfungsi sebagai media penyaluran subsidi sarana produksi nelayan, terutama Bahan Bakar Minyak (BBM). Kartu ini

merupakan bagian dari Sistem Informasi Layanan BBM Bersubsidi untuk Nelayan (SIMINA). Kartu nelayan sudah didistribusikan di 16 Kabuapten/Kota di pesisir Jawa Tengah sampai akhir 2018 terdistribusi sebanyak 114.443 Kartu.

- **Menumbuhkan Start Up Wirausaha Baru**

Program ini merupakan upaya menciptakan wirausaha baru dari kelompok miskin, terutama kelompok muda yang produktif. Kegiatan utama dari program ini ialah peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai pelatihan dan bimbingan teknis.

- **Kredit Usaha Dengan Bunga Rendah**

Program ini diperuntukkan bagi kelompok miskin produktif yang ingin meningkatkan kapasitas usahanya. Program dilaksanakan melalui kerja sama dengan Bank Jateng. Pemberian kredit usaha rakyat (KUR) melalui 2 skema, yaitu: 1) KUR Mitra 02 untuk usaha kecil tanpa agunan, maksimal pinjaman 2 juta rupiah dan bunga sebesar 2 persen, diberikan secara kelompok dengan anggota minimal 5 orang; 2) KUR Mitra 25, yaitu pinjaman khusus bagi pelaku usaha mikro dengan plafon sampai 25 juta rupiah, serta bunga 7 persen.

b. Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah

Program-program yang berasal dari Pemerintah Pusat seperti BPNT, PKH, JKN-KIS, PIP-KIP, dan RTLH, merupakan program pemenuhan kebutuhan dasar yang sifatnya jangka pendek, namun masyarakat sangat membutuhkan. Sasaran program sebenarnya jelas kepada orang yang termiskin (desil 1 sampai 4), namun penerima program tidak lagi sesuai sasaran, banyak di luar sasaran (desil 5-10) yang juga menerima program.

Sebagaimana data lapangan, dihimpun dari informan penerima program diapati hasil 21,54 persennya memiliki pengeluaran per kapita lebih dari 1,6 garis kemiskinan, atau termasuk kalangan tidak miskin. Dari total informan penerima program, hanya 26,21 persen yang sangat miskin dan 13,99 persen miskin. Hal ini menunjukkan prioritas penerima program belum sesuai ketentuan.

Penerima program PKH teridentifikasi masih banyak orang yang mampu, sebaliknya banyak orang miskin yang semestinya berhak mendapatkan bantuan tetapi tidak mendapatkan PKH. Demikian juga keluarga yang mempunyai lansia dan difabel tidak menerima, sehingga komponen PKH yang diterima tidak komplit. Orang desa baik miskin ataupun mampu sangat mengharapkan mendapat PKH karena PKH dianggapnya gaji bulanan yang datang dari pemerintah. Program BPNT juga hampir sama, banyak orang yang mampu menerima BPNT, masih ada masyarakat penerima BPNT diminta sukarela untuk diberikan pada warga miskin yang tidak menerima.

Penerima bantuan PIP sebagian adalah kelompok tidak miskin, hal ini terjadi karena basis data yang digunakan adalah data anak sekolah. Sedangkan anak-anak di kampung/desa yang tidak sekolah karena tidak mampu tidak bisa dijangkau dengan program itu karena belum masuk data anak sekolah.

Program jaminan kesehatan (KIS) masih banyak warga yang miskin tidak bisa berobat karena tidak mendapatkan kartu, dimana banyak kartu yang jatuh kepada masyarakat yang mampu. Dalam satu keluarga miskin terjadi ada yang mempunyai KIS, tetapi ada yang tidak mempunyai KIS, sehingga bagi yang tidak mempunyai kartu menyulitkan ketika dia sakit padahal masih dalam satu keluarga miskin.

Program RTLH baik melalui Kementerian PUPR maupun Kementerian Sosial memerlukan persyaratan formal, seperti sertifikat tanah, kepemilikan rumah, dan modal, sehingga orang miskin yang tidak mempunyai persyaratan formal tidak memperoleh RTLH, walaupun rumahnya tidak layak huni. Bahkan orang yang tidak memiliki tanah dan rumah sama sekali tidak mungkin tersentuh program ini.

Program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan pendamping dari program pusat, serta sebagian program yang dikembangkan sendiri. Untuk program yang sifatnya mendampingi alokasinya ditujukan kepada masyarakat miskin yang seharusnya memperoleh tetapi belum memperoleh dalam arti memenuhi kuota program pemerintah pusat saja seperti KIS (BPJS PBI Non Kuota). Namun karena data masyarakat miskin belum beres maka penerima program tetap saja masih bias. Program yang diluar program pemerintah pusat seperti Kartu Tani, Kartu Nelayan, KUR, *Start Up*, *Boarding School*, penerima programnya masih belum focus menysasar kepada warga miskin yang masuk pada desil 1 sampai 4, masih banyak yang menysasar ke desil 5 keatas.

Program pemerintah kabupaten sangat beragam, ada yang peduli dengan mengalokasikan dana, ada juga yang hanya berharap dari dana pusat dan provinsi. Ada juga yang mengalokasikan dana kemiskinan yang sumbernya dari APBD, non APBD, iuran sukarela pegawai, Basnas peruntukannya pun beragam.

Pemerintahan Desa sebagian besar tidak mengalokasikan dana desa, padahal orang miskin, lokasinya di desa, dan itu merupakan warganya. Mestinya desa sudah mulai merancang anggaran desa untuk penanggulangan kemiskinan.

Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kota dan Desa/Kelurahan perlu membangun sinergitas agar terjadi kolaborasi program dan kegiatan. Mengingat semua tingkatan pemerintahan mempunyai alokasi dana, maka perlu juga pihak swasta terlibat, sehingga masyarakat miskin betul betul tertangani dengan program yang jelas, pertanggung jawaban jelas, sasarannya juga tidak bias. Siapa yang harus menangani kebutuhan dasar jangka pendek, siapa yang harus menangani peningkatan kapasitas, orang miskin, siapa yang harus menangani peningkatan pendapatan, siapa yang harus menangani sapsras dan lain sebagainya. Sehingga program tidak tumpang tindih dan setiap saat bisa di lihat penurunan orang miskin.

c. Persepsi Terhadap Implementasi Program

Pengetahuan informan terhadap pengertian dan konsep program penanggulangan kemiskinan cukup beragam. Informan yang menyatakan bahwa mereka mengetahui pengertian dan konsep penanggulangan kemiskinan sebesar 58 persen, dan 29 persen menyatakan tidak tahu, sementara 13 persennya tidak memberikan pendapat. Informan yang menjawab bahwa mereka mengetahui program penanggulangan kemiskinan mendeskripsikan bahwa program penanggulangan kemiskinan adalah program pemerintah untuk membantu mengurangi kemiskinan, dilakukan dengan cara memberi bantuan seperti KIP, KIS, dan PKH. Sebagian lain menyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan program untuk meringankan beban ekonomi masyarakat kurang mampu. Sebagian juga memberi pernyataan bahwa program penanggulangan kemiskinan merupakan bantuan yang diberikan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat. Sebagian lain menyatakan

program penanggulangan kemiskinan membantu orang-orang yang tidak mampu, yang mempunyai anak sekolah, lansia, ibu hamil dan balita, pendapat lain yang hampir sama juga menyatakan bahwa program penanggulangan kemiskinan adalah biaya ditanggung pemerintah seperti kesehatan dan sekolah. Pengertian tersebut lebih merujuk kepada konsep PKH.

Sebagian informan yang menyatakan tidak tahu tentang program penanggulangan kemiskinan disebabkan karena kurangnya sosialisasi. Mereka tidak tahu atau tidak paham tentang program penanggulangan kemiskinan karena tidak pernah mendapatkan sosialisasi atau jarang mengikuti berita-berita terkini.

Sebagian besar informan (71,72 %) menyatakan bahwa mereka mengetahui jenis-jenis program yang telah dilaksanakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, sedangkan sisanya menyatakan tidak tahu dan tidak menjawab. Informan yang menyatakan mengetahui jenis program penanggulangan kemiskinan sebagian besar menjawab berupa bantuan anak sekolah, bantuan beras, telur, bedah rumah, kesehatan, dan uang. Bentuk program yang paling banyak diketahui adalah KIP, PKH, BPNT, KIS, serta RTLH dan Jamban. Informan yang menjawab belum menyatakan karena mereka tidak mengetahui detailnya, dan sebagian kecil menyatakan karena belum tepat sasaran.

Mayoritas informan (80%) menyatakan program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan selama ini bermanfaat bagi mereka- Sebagian kecil informan menyatakan bahwa program selama ini belum ada manfaat bagi mereka, serta sebagian lagi tidak menjawab.

Menurut sebagian besar informan, program penanggulangan kemiskinan telah meringankan biaya kehidupan sehari-hari, memenuhi

kebutuhan sehari-hari, mengurangi pengeluaran, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Program penanggulangan kemiskinan juga membantu biaya pengobatan (gratis), mengurangi biaya sekolah dan menambah bahan pokok. Secara umum program penanggulangan kemiskinan telah meringankan biaya, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan pertanian. Program penanggulangan kemiskinan bermanfaat meringankan kemiskinan. Informan yang berpendapat bahwa program tidak bermanfaat karena mereka belum mendapatkan bantuan, sebagian lagi belum merasakan adanya perubahan.

Mayoritas informan (71%) menyatakan bahwa program yang dijalankan telah tepat sasaran. Sebagian tidak menjawab pertanyaan, dan sebagian lagi menjawab tidak tepat sasaran. Informan yang menjawab sudah tepat sasaran karena menurut mereka hanya warga miskin yang berhak menerima. Bantuan tersebut diberikan kepada keluarga yang tidak mampu atau ekonomi lemah agar bermanfaat meringankan beban masyarakat miskin. Sedangkan yang menjawab tidak tepat karena mereka melihat bahwa ada tetangga tidak mampu tapi tidak dapat bantuan, dan sebaliknya, yang sudah mampu mendapat bantuan, terutama PKH. Sebagian melihat kelompok rentan seperti janda tua yang belum mendapatkan. Sebagian sudah tepat sasaran, tetapi sebagian masih belum tepat.

Sebanyak 72 persen informan menyatakan bahwa bentuk program telah sesuai dengan kebutuhan sehari-hari mereka (konsumsi, pendidikan, kesehatan), 10 persen lainnya menyatakan tidak sesuai dengan kebutuhan sehari-hari mereka. Informan yang menjawab bahwa program telah sesuai menyatakan bahwa program sangat membantu kebutuhan hidup

mereka, sudah tepat sasaran bagi yang menerima. Sementara mereka yang menjawab tidak sesuai karena program yang belum tepat sasaran, dimana banyak orang mampu mendapat bantuan, sementara sebagian yang tidak mampu belum mendapat bantuan.

Sebagian besar informan menyatakan bahwa orang miskin membutuhkan bantuan, terutama pendidikan, kesehatan, pangan, uang tunai dan berbagai bantuan lainnya. Sebagian juga menyatakan mereka membutuhkan bantuan modal, bantuan tempat tinggal, lapangan pekerjaan, pendampingan berusaha, dan subsidi.

Harapan informan terhadap pemerintah terkait dengan penanggulangan kemiskinan adalah agar program-program bantuan yang sudah berjalan tetap dilanjutkan, bahkan ditambah jumlah dan jenisnya. Sebagian informan juga menginginkan adanya evaluasi dan pendataan ulang agar bantuan tepat sasaran, pemberian bantuan modal, bantuan uang tunai, bantuan pendidikan, pelatihan dan meringankan beban dengan menggratiskan semua biaya untuk masyarakat miskin.

Pembahasan

Analisis Kondisi Lapangan

1) Konsep dan Definisi Kemiskinan

Salahsatu permasalahan adalah masih belum tuntasnya pemahaman mengenai makna kemiskinan makro dan mikro. Banyak pihak menganggap bahwa penyelesaian kemiskinan mikro *by name by address* akan berpengaruh langsung terhadap survei kemiskinan makro yang dilakukan BPS. Akibatnya terdapat miskonsepsi ketika pejabat pemerintah daerah merasa sudah berupaya optimal berdasarkan data mikro, namun angka kemiskinan masih tetap tinggi sesuai data makro.

Di lapangan juga masih terjadi kebingungan tentang indikator seseorang masuk dalam kategori

miskin. Belum ada sosialisasi menyeluruh tentang siapa yang berhak masuk dalam BDT, apa indikatornya dan siapa yang menentukan otoritasnya, akibatnya banyak persepsi yang menentukan pada proses pendataan tersebut. Maka, indikator kemiskinan perlu dirubah, sehingga wilayah yang semestinya daerah mampu menjadi daerah miskin karena indikator, sebagai contoh, perilaku masyarakat desa yang masyarakatnya mampu, tetapi karena perilaku tidak mau punya MCK karena BAB lebih senang ke kolam, walau pendapatannya tinggi mereka tetap menjadi orang miskin, padahal secara absolut mereka tidak miskin karena punya rumah bagus, punya mobil dan motor, punya perhiasan yang banyak.

Selain itu kerancuan mengenai data dan program, seolah-olah jika sudah masuk data harus mendapat bantuan, kenyataannya setiap program memiliki sasaran tersendiri yang memang harus bersumber dari data BDT namun tidak semua yang masuk dalam data dijamin BDT mendapat program. Karena BDT berisi 40 persen penduduk berpenghasilan terendah.

Lebih lanjut, fakta menunjukkan bahwa penurunan penduduk miskin yang tercermin dari laporan BPS dinilai tidak jadi jaminan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan. Meski penduduk miskin turun, kualitas hidup dan ketergantungan terhadap berbagai bantuan-bantuan dari pemerintah dianggap masih terlalu tinggi sehingga masyarakat belum mandiri atau lepas dari kemiskinan absolut.

2) Dukungan Kebijakan

Sebagian daerah penelitian telah memiliki regulasi khusus tentang penanggulangan kemiskinan, antara lain Purbalingga, Banyumas, Kabumen, Purworejo, Grobogan, Demak, Sragen.

Selain regulasi, di beberapa kabupaten juga mempunyai terobosan strategi penanggulangan kemiskinan

secara spesifik, seperti Gebertaskin di Grobogan, UPTPK Sragen, Kartu Banyumas pintar dan Banyumas Sehat, Pronanhhkis di Purbalingga. Ada juga daerah yang melakukan kerjasama dengan pihak non pemerintah seperti Kabupaten Pemasang dengan LSM KOMPAK, sebagian lagi memanfaatkan lembaga BAZNAS seperti di Blora dan Kebumen. Kabupaten Brebes memebntuk satuan kerja tersendiri fokus penanggulangan kemiskinan yaitu Bagian Penanggulangan Kemiskinan pada Sekretariat Daerah.

Untuk persoalan anggaran, pada umumnya setiap Kabupaten mengalokasikan anggaran pendamping untuk program pusat, terutama JKN KIS untuk kesehatan, RTLH, dan Beasiswa. Pemerintah daerah juga mempunyai program dampingan untuk pendidikan berupa kartu pintar.

Di Jawa Tengah belum ada kebijakan baik dari pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk mengalokasikan dana pendamping PKH. Tidak ada bantuan dari pemerintah daerah untuk masyarakat miskin yang tidak tercover PKH. Pemerintah provinsi dan kabupaten juga belum menyediakan personel tenaga pendamping program PKH yang sesuai kebutuhan masyarakat di tingkat desa. Pendamping PKH yang disediakan pemerintah pusat hanya sampai di tingkat kecamatan dengan jumlah terbatas, sehingga beban pekerjaan cukup berat, serta kurang memahami kondisi lapangan di setiap desa.

3) Database Kemiskinan

Di lapangan ditemukan bahwa salahsatu sumber masalah utama penanggulangan kemiskinan adalah banyak data salah sehingga sasaran program menajdi kurang tepat bahkan menimbulkan konflik di masyarakat. Oleh sebab itu pemutakhiran data perlu mendapat perhatian serius agar sasaran program lebih baik. Data BDT (Basis Data Terpadu) Penanggulangan

Kemiskinan sampai saat ini masih bermasalah pada *updating* data, akibatnya terjadi *inclusion error* dan *exclusissson error* yang terus menerus.

Salah satu upaya penyelesaian *updating* data yang bermasalah adalah melalui pemutakhiran data BDT berbasis masyarakat di tingkat desa atau melalui musdes, namun terbentur pada permasalahan politik kepala desa atau perangkat desa misalnya karena pendukungnya, kerabat, atau orang dekat. Kendala lain masalah *updating* data di desa adalah tidak tersedianya dana untuk melakukan update data. Beberapa daerah sudah melakukan upaya pemutakhiran data dari tingkat desa/kelurahan melalui Musdes setahun 2 kali. Di beberapa daerah juga diberlakukan kebijakan data orang miskin harus ditempel di balai desa dan bisa dicek oleh masyarakat.

Kendala pada proses pemutakhiran di tingkat lanjutan belum adanya tindaklanjut yang sama di tingkat pusat. Ketika dilakukan verifikasi dan validasi data di tingkat desa kemudian diusulkan ke tingkat Kabupaten dan diteruskan ke Kemensos, data yang ditetapkan masih data yang lama, sehingga tidak terdapat perubahan sesuai usulan dari tingkat desa. Untuk menyikapi hak tersebut, maka otoritas verifikasi dan validasi data sebaiknya diserahkan kepada daerah, kabupaten maupun provinsi, adapun indikator masih tetap menjadi kewenangan pusat.

Masalah pendataan saat ini terkendala oleh anggaran pemerintah daerah yang terbatas. Dengan adanya partisipasi masyarakat, maka pemutakhiran data sebetulnya bisa lebih efisien. Sebetulnya tersedia potensi dana desa untuk mengatasi masalah tersebut.

4) Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Peran masyarakat dan pemerintah desa adalah melakukan

monitoring untuk memastikan program tepat sasaran. Monitoring dilakukan untuk memastikan penggunaan bantuan sesuai dengan peruntukan. Masyarakat bisa memanfaatkan kelembagaan yang ada, atau dibentuk lembaga baru. Dengan adanya partisipasi maka diharapkan data, usulan penerima program, dan jenis bantuan bisa sesuai dengan kondisi di lapangan.

Pada tingkat masyarakat penerima program, kesadaran kelompok masyarakat yang sudah tergolong mampu untuk mengundurkan diri masih rendah. Masih sedikit masyarakat yang mendapatkan bantuan namun merasa mampu dan memiliki keinginan mengundurkan diri. Mereka yang sudah mampu masih tetap menikmati bantuan, sebaliknya mereka yang merasa berhak dan belum mendapatkan bantuan memiliki perasaan iri, hal ini menyebabkan konflik horizontal di masyarakat. Selain itu juga terdapat konflik kepentingan ketika kepala desa tidak mau mencoret nama-nama dalam data BDT untuk kepentingan pendukungnya. Fakta menunjukkan banyak kesalahan atau ketidaksesuaian sasaran penerima dari akibat kepentingan sosial dan politik ini.

Berdasarkan kondisi di atas, perlu strategi agar warga miskin yang sudah merasa mampu dengan kesadaran sendiri keluar dari penerima bantuan program kemiskinan agar kuota bisa dimanfaatkan masyarakat yang lebih miskin. Salahsatu cara sederhana yaitu dengan pemasangan (stiker) tanda keluarga miskin, dan memberikan penghargaan berupa piagam dari kepala daerah. Selain itu, sebagai upaya memberikan penghargaan kepada pelaksana di lapangan dalam hal ini pengelola program penanggulangan kemiskinan (Kepala Desa, Pendamping, dan petugas lainnya) perlu diadakan award untuk mendapatkan reward. Untuk Pendamping atau PPL pemberian reward berbasis kinerja.

Program pengembangan ekonomi untuk penanggulangan kemiskinan seperti KUR, KUBe, BAZNAS dan Bantuan atau Kredit lainnya perlu pendampingan yang bersifat kreativitas inovatif untuk tercapainya program, bantuan modal agar dapat berhasil meningkatkan pendapatan, dengan melibatkan perusahaan swasta yang beroperasi di wilayah sekitar.

5) Tata Kelola Program

Penentuan data masyarakat miskin (BDT/DTKS) sebagai dasar penerima program penanggulangan kemiskinan dari pusat sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah pusat/Kemensos. Meskipun verifikasi telah dilakukan dari tingkat desa, namun ketika sampai pusat berlaku ketentuan kuota, dimana kelebihan data (usulan orang miskin) langsung dipotong begitu saja berdasarkan urutan, sehingga data yang baru cenderung tidak tertampung. Sistem kuota program yang menjadi kebijakan Kemensos yang didasarkan pada anggaran yang tersedia ini tidak sesuai dengan jumlah usulan setiap daerah sehingga tidak bisa menjangkau pada jumlah orang miskin yang perlu dibantu.

Sistem program *top down* menimbulkan konflik antarmasyarakat, dan antar masyarakat dan perangkat desa. Masyarakat menganggap desa atau ketua kelompok PKH tidak memasukkan nama mereka, namun kades juga tidak memiliki otoritas untuk menentukan penerima bantuan. Selain itu juga terdapat konflik kepentingan ketika kepala desa tidak mau mencoret nama-nama dalam data BDT untuk kepentingan pendukungnya. Fakta menunjukkan banyak kesalahan atau ketidaksesuaian sasaran penerima.

Pada saat implementasi program di lapangan juga masih terlihat adanya ego sektoral cukup menonjol. Sedangkan di sisi lain aksi penanggulangan kemiskinan

memerlukan kolaborasi semua program OPD, karena kemiskinan bersifat multidimensi. Untuk operasionalisasi, kelembagaan penanggulangan kemiskinan juga belum sampai ke *grassroot*, sehingga koordinasi program tidak sampai ke bawah. Hal ini menjadi salahsatu penyebab belum tepatnya sasaran kegiatan penanggulangan kemiskinan sampai tingkat bawah.

Sasaran program masih kurang tepat, karena banyak penerima program yang tidak memenuhi syarat sebagai orang miskin. Hal ini dikarenakan data yang kurang valid, dan konsep *top down* dimana penerima langsung ditentukan dari atas. Oleh sebab itu perlu mekanisme yang lebih moderat dan memahami kondisi di lapangan.

Dalam konteks pelaksanaan program terdapat beberapa hal yang di satu sisi memerlukan persyaratan dan penyesuaian, sehingga tidak semua orang bisa mengaksesnya. Sebagai contoh bantuan seperti RTLH dan jambanisasi terdapat persyaratan untuk modal / iuran biaya tambahan sehingga banyak kalangan termiskin tidak mampu untuk mengakses program tersebut.

Implementasi program di beebraapa daerah juga dimodifikasi oleh masyarakat. Sebagai contoh di Cilacap terdapat kebijakan lokal di salahsatu desa bantuan tidak disampaikan seluruhnya, namun diambil/dipotong sebagian dan diberikan kepada yang tidak mendapatkan bantuan. Ada kesadaran dari masyarakat bahwa sebagian mereka sebenarnya tidak pantas, sementara sebagian lagi yang lebih pantas belum mendapatkan bantuan.

6) Dampak Program

Penerima program yang bersifat bantuan seperti BPNT, PKH, KIS, KIP sebagian besar merasakan manfaat berupa terbantunya beban kebutuhan hidup mereka. Ketika dilihat lebih mendalam, penerima bantuan

tersebut tidak sedikit yang sebenarnya tergolong keluarga produktif, berpotensi untuk mampu. Sebagian besar menyatakan ingin tetap mendapatkan bantuan sampai pemerintah menghentikannya, dan ditemukan bahwa bantuan yang diterima masyarakat relatif tidak berkelanjutan dan lebih bersifat konsumtif, bukan ke arah produktif. Oleh karena bantuan yang disampaikan sifatnya sesaat, belum ada bantuan yang berorientasi pada produktifitas kelompok masyarakat miskin agar mereka menjadi lebih produktif.

Ada kecenderungan umum bantuan penanggulangan kemiskinan tidak dimanfaatkan sebagaimana peruntukannya. Misalnya bantuan sekolah digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Dengan demikian orientasi program yang berharap bisa meringankan beban, dan jatuh ke tangan orang yang tidak miskin justru akan meningkatkan konsumtif mereka.

d. Desain Penanggulangan Kemiskinan yang Dibutuhkan

Perbaikan terhadap konsep penanggulangan kemiskinan atau desain baru penanggulangan kemiskinan dapat dilihat dari tiga aspek. Pertama adalah kebijakan berisi tentang konsep dan sinergi, kedua adalah kelembagaan, dan ketiga adalah desain program (prinsip dan bentuk teknis kegiatannya).

Kebijakan penanggulangan kemiskinan sebenarnya sudah menjadi gerakan besama, namun masih memiliki keterbatasan kolaborasi. Mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, bahkan desa memiliki komitmen penurunan angka kemiskinan, akan tetapi belum ada komitmen kolaborasi. Perlunya komunikasi dan sinergi antar stakeholder, kerjasama, dan saling melengkapi dari semua unsur, baik pemerintah maupun non pemerintah. Seluruh OPD dan stakeholder lainnya seperti pengusaha swasta, harus

diarahkan, sehingga menjadi optimal, tidak boleh ada ego sektoral yaitu dengan "sistem keroyokan". Komitmen kebijakan ini tidak saja diwujudkan dalam regulasi berupa aturan, tetapi juga adanya alokasi sumberdaya yang memadai. Sinergi juga bukan berarti semua harus sama dan terpusat, akan tetapi justru kebijakan tersebut harus mampu melihat realitas lapangan yang berbeda-beda.

Pembenahan kelembagaan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan revitalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dengan kewenangan yang lebih kuat dan melakukan kolaborasi antarpihak. TKPKD hanya sampai tingkat kabupaten, serta hanya melibatkan unsur pemerintah daerah saja dengan fungsi koordinatif yang kurang optimal. Maka, usulan perubahan kelembagaan adalah transformasi TKPK dari administratif, menjadi kolaboratif. TKPK memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi bentuk kegiatan dan sasaran bagi OPD dan lembaga terkait agar penanggulangan kemiskinan. Dari aspek struktur kelembagaan TKPK seharusnya sampai tingkat desa untuk mengkoordinir di tingkat bawah.

Usulan perbaikan desain program penanggulangan kemiskinan sesuai analisis data lapangan, diwujudkan dalam konsep terpadu yang memiliki 5 area utama. Area utama program penanggulangan kemiskinan yang harus disentuh, yaitu: 1) penguatan organisasi masyarakat miskin; 2) pemberdayaan masyarakat; 3) perlindungan sosial; 4) peningkatan kapasitas masyarakat miskin; dan 5) perluasan kesempatan kerja. Prinsip tersebut bersifat keberlanjutan, bukan pemenuhan kebutuhan sesaat sebagaimana yang dominan saat ini.

Penguatan organisasi masyarakat miskin diperlukan untuk membuka akses mereka kepada

program yang diperlukan. Saat ini akses masyarakat miskin ke organisasi masih rendah, oleh sebab itu perlu adanya upaya penguatan akses dan pelibatan masyarakat miskin di dalam setiap pengambilan kebijakan. Masyarakat miskin harus dipastikan memiliki akses yang terbuka terhadap lembaga pemberdayaan masyarakat. Organisasi penanggulangan kemiskinan rata-rata sampai tingkat kabupaten, maka perlu diturunkan sampai tingkat desa agar menyentuh sasaran. Selain itu perlu dioptimalkan dan disinergikan lembaga swasta agar lebih berperan dalam penanggulangan kemiskinan.

Pemberdayaan masyarakat miskin seyogyanya diarahkan yang bersifat produktif, melalui pelatihan, fasilitasi usaha, akses peralatan, modal, dan pasar. Masyarakat miskin masih sebagai objek program yang bersifat *top down*, oleh sebab itu perannya perlu ditingkatkan melalui pelibatan dalam setiap pengambilan keputusan. Penetapan calon penerima program oleh OPD seyogyanya melibatkan peran kelompok masyarakat, sehingga tepat sasaran pada masyarakat miskin. Selain itu perlu peningkatan sosialisasi berbagai ketentuan, jenis dan bentuk program kepada calon penerima program.

Perlindungan sosial selama ini sudah banyak mendapatkan perhatian, hanya saja sarannya kurang optimal. Perlu ada evaluasi terhadap data dan kriteria orang miskin sehingga sarannya lebih tepat. Perlu dipastikan bahwa yang mendapatkan perlindungan sosial adalah mereka yang benar-benar memerlukan. Selain itu, jangka waktu perlindungan perlu dibatasi agar bisa mendorong masyarakat miskin berubah menjadi mandiri, serta sumberdaya bisa dialihkan untuk sasaran lainnya. Lebih penting lagi, jenis bantuan sosial hendaknya disesuaikan dengan potensi masalah dan kebutuhan kelompok masyarakat.

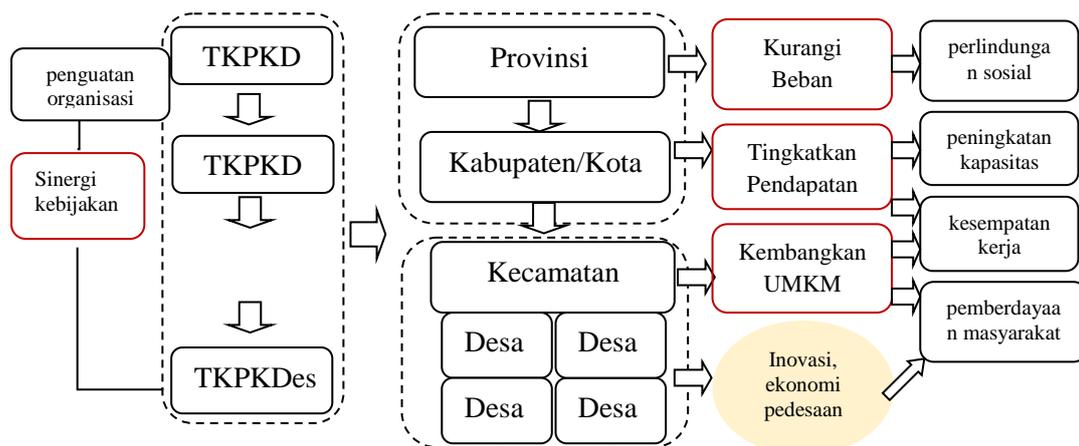
Fokus penanggulangan kemiskinan adalah peningkatan kapasitas dan daya saing orang miskin melalui perbaikan kesehatan, pendidikan, dan keterampilan sehingga bisa menjadi kelompok masyarakat produktif. Catatan dalam RPJMD Jateng pendidikan akan menjadi perhatian, termasuk juga sekolah swasta, sehingga bisa menjamin semua anak bisa sekolah tidak terbentur biaya. Pelatihan terhadap masyarakat miskin perlu disesuaikan dengan kompetensi calon penerima, serta potensi dan peluang kerjanya. Balai latihan kerja juga agar didekatkan dengan lokasi calon penerima manfaat.

Perluasan kesempatan kerja disamping pada lapangan kerja yang bersifat padat karya, juga yang berkelanjutan. Pemerintah daerah selain fokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, juga harus memperhatikan pemerataan. Ketimpangan pembangunan menyebabkan ketimpangan pendapatan. Banyaknya kemiskinan di pedesaan dimana pembangunan terpinggirkan menunjukkan hal tersebut.

Peluang lapangan kerja untuk orang miskin sebaiknya diperluas ke

berbagai sektor, terutama ekonomi kreatif agar memberikan kesempatan lapangan kerja baru. Hal ini sesuai dengan kecenderungan masyarakat miskin dimana sebagian besar memiliki keterbatasan akses terhadap sektor pekerjaan formal. Banyak industri yang mensyaratkan tingkat pendidikan tertentu, sertifikat keterampilan, dan persyaratan lainnya yang sulit dipenuhi orang miskin. Oleh sebab itu sektor informal dan industri kreatif perlu didorong sebagai salahsatu alternatif utama menciptakan lapangan kerja.

Desain penanggulangan kemiskinan yang dibutuhkan sesuai penjelasan di atas adalah memiliki dimensi keberlanjutan, menjadikan masyarakat sebagai subjek dimana mereka ikut menentukan program yang akan dijalankan, prinsip pemberdayaan dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan program penanggulangan kemiskinan, sekaligus mengedukasi masyarakat miskin, berubah mental menjadi produktif. Pemetaan kemiskinan berdasarkan kelompok usia produktif, usia non produktif, disabilitas, kondisi kesehatan fisik, dan keterampilan.



Gambar 1
Desain Program Penanggulangan Kemiskinan Jawa Tengah

A. Penutup Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap data dan fenomena di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Implementasi program penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah masih ditemui kendala salah sasaran dan kurang efektif. Salah sasaran karena data kurang akurat. Program kurang efektif karena bersifat pemberian dibanding kegiatan produktif, dan kurang pendidikan untuk lepas dari kemiskinan. Program menimbulkan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan.

Desain program yang implementatif berprinsip pemberdayaan dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan. Masyarakat ditempatkan sebagai subjek yang ikut menentukan program dan kegiatan. Substansi program sekaligus mengedukasi masyarakat miskin untuk berubah mental dan budaya (kultur) menjadi produktif.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

Mengatasi salah sasaran program perlu perbaikan pendataan, yaitu peninjauan kembali terhadap

kriteria kemiskinan, verifikasi dan validasi melibatkan masyarakat. Verifikasi dan validasi data melibatkan unsur terkait (polri, kejaksaaan) dalam penertiban data agar menjadi *shock therapy* bagi pemberi data palsu.

Substansi program sebaiknya diarahkan kepada kegiatan produktif, ditambahkan pendidikan atau edukasi tentang pengentasan kemiskinan.

Pemerintah daerah melibatkan masyarakat dalam penyusunan desain program penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebutuhan. Desain program memperhatikan kebutuhan, kemampuan dan potensi lokal masyarakat. Bentuk program juga mampu memilah sasaran, apakah kelompok produktif atau nonproduktif. Untuk kelompok produktif lebih bersifat meningkatkan kapasitas dan kesempatan kerja. Salahsatu alternatif adalah potensi perekonomian desa melalui konsep pengembangan wilayah pedesaan seperti pengembangan pariwisata, UMKM pengolahan, industri kreatif.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memungkinkan terlaksananya penelitian dan penyusunan naskah laporan ini.

Pustaka Acuan

Apsari, Lindiya, Endriatmo Soetarto, & Lukman M. Baga (2019). Evaluasi Program Pemberdayaan Partisipatif Gerbangmas-Taskin (Studi di Desa Pandak Daun, Provinsi Kalimantan Selatan.

Jurnal Penyuluhan, Maret 2019
Vol. 15 No. 1. H 1-16

Asfi, Nuskhya dan Holi Bina Wijaya (2015). Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Pada Program Gerdu Kempling Di Kelurahan Kemijen Kota Semarang. *Jurnal Teknik*

- Perencanaan Wilayah dan Kota*, Volume 4 Nomor 2 2015. H 253 – 268. Online : <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/pwk>. Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik UNDIP
- Ariyani, Nafiah, Akhmad Fauzi, Bambang Juanda, & Irfan Syauqi Beik (2015). Evaluasi Pogram Pengentasan Kemiskinan Menggunakan Metode Rappoverty. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 6, No. 2, Desember 2015. Hal. 181 - 197
- BPS. 2019. Pofil Kemiskinan di Indoensia, Maret 2019. <https://www.bps.go.id/website/images/Profil-Kemiskinan-Maret-2019-ind.jpg>, diakss3 Desember 2019
- BPS Jawa Tengah. 2019. Berita Resmi Statistik Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Maret 2019 No. 47/07/33/Th.XIII 15 Juli 2019. <https://jateng.bps.go.id/pressrele> [ase/](https://jateng.bps.go.id/pressrele/ase/). Diakses 3 Desember 2019
- _____. 2019. Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah 2019. <https://jateng.bps.go.id/publication/>, diakses 3 Desember 2019
- Chambers, Robert (1998). *Pembangunan Desa: Mulai dari Belakang*. Jakarta: LP3ES (Terjemahan)
- Damanik, Yenchilia Tresna, & Aufarul Marom (2016). Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pelatihan Keterampilan Di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang, *Journal Of Public Policy And Management Review*. Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
- Hidayat (2017). Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Barat (Studi Kasus Kebijakan Pembangunan Desa). *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA)*, No.2 Tahun XI Juni 2017. H. 66-72
- Kharismawati, Ika Surya, & Weni Rosdiana (2018). Implementasi Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Melalui E-Warung di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. *Jurnal Publika*. Vol 6, No 8 (2018, <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/>. UNESA
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Mahaeni, AAIN, I Ketut Sudibia, IGAP Wirathi, Surya Dewi Rustariyuni, & Ni Putu Martini Dewi (2018). Evaluasi Program-Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Bali, *PIRAMIDA Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Volume X No. 1 Juli 2014. H 8-18
- Mursyidah, Lailul (2017). Efektivitas Program Bantuan Tunai Bersyarat Mengatasi Kemiskinan dan Kelaparan, *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 5 (2), September 2017, 245-260
- Mustafida, Nunung Ifanatul (2019). *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kajarharjo Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi*. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember. <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/96399/Nunung%20Ifanatul%20Mustafida-150910301011.pdf?sequence=1>

- [&is Allowed=y](#). Diakses 2 Maret 2020
- Nainggolan, Togiartua, Sutaat, Anwar Sitepu, Teti Ati Padmi, Muchtar, Irmayani, & Bonar Hutapea (2012). *Program Keluarga Harapan Di Indonesia: Dampak Pada Rumah Tangga Sangat Miskin di Tujuh Provinsi*. Jakarta: P3KS Press.
- Nuraida, Budiman Rusli, Sintaningrum, & Mudiwati Rahmatunnisa (2019). Evaluasi Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Subang, *MIMBAR: Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*. Volume 8 No. 1. Juni 2019. Hal 38 - 47
- Rohmi, Misfi Laili (2018). *Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bantuan dan Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat (Studi Kasus di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung)*. Skripsi. Program Pascasarjana Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Bandar Lampung. <http://digilib.unila.ac.id/31010/3/TEISIS%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>. Diakses 2 Maret 2020
- Suryawati, Indah (2014). Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Joko Widodo Dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Opini Pemegang Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar di DKI Jakarta). *Jurnal Ilmiah Komunikasi MAKNA*, Vol. 4 No. 2, Agustus 2013-Januari 2014